
RENCANA KERJA PERUBAHAN

2023



KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN PELAIHARI
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah yaitu pada Bab X tentang Perubahan Rencana Pembangunan Daerah, untuk Penyusunan Perubahan RKPD dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2023.

Berdasarkan peraturan tersebut Perubahan RKPD Tahun 2023 dan Perubahan Renja SKPD Tahun 2023, dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi :

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
4. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/ kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
5. Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa penyusunan RABPD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman Penyusunan RAPBD, maka untuk menjaga konsistensi antara Perencanaan dan Penganggaran,

Perubahan RKPD Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2022.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA Perubahan SKPD) Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dilandasi oleh :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6398);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tamabahan Lembaran Negara Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Laut 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2008 Nomor 11);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanah Laut 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 33);
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor);
 20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 21. Peraturan Bupati Kabupaten Tanah Laut Nomor 76 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 53 Tahun 2021 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022.
 22. Surat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Nomor 050.13/461/Perenc.Makro/2022 perihal Permintaan Dokumen Renja Perubahan SKPD TA. 2022.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja SKPD (Renja Perubahan SKPD) adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan acuan bagi SKPD Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut agar dalam pelaksanaan kegiatan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD Kecamatan Pelaihari;
- b. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang dalam penyusunan RKA SKPD Kecamatan Pelaihari;
- c. Memberikan acuan bagi SKPD dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 disajikan dalam bentuk sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang penyusunan renja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan target Renstra SKPD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perubahan SKPD tahun-tahun sebelumnya.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra SKPD.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA - SKPD TAHUN 2023

2.1. Evaluasi Pelaksanaan RENJA Kecamatan Pelaihari Sampai dengan Tw.2 Tahun 2023

Pada saat disusunnya Perubahan Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 ini, pelaksanaan kegiatan tahun 2023 masih berjalan dan telah dilaksanakan dengan optimal dengan capaian realisasi dari pagu semula Rp.11.607.720.392,- dan terealisasi sebesar Rp.6.163.497.812,- atau 53,10% sehingga dapat direncanakan kembali renja perubahan untuk program, kegiatan, dan sub kegiatan tahun ini. Hal ini dikarenakan terlaksananya kegiatan dan dapat memenuhi output yang diharapkan sehingga dalam pelaksanaannya yang menyangkut pelayanan terhadap masyarakat berjalan dengan baik disamping itu pula dukungan dan partisipasi yang baik dari masyarakat dapat tercapai. Untuk lebih lengkapnya berikut adalah tabel realisasi fisik dan keuangan Kecamatan Pelaihari sampai dengan TW.2 Tahun Anggaran 2023.

Tabel 2.1 Tabel Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kecamatan Pelaihari sampai dengan TW.2 Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV		9		10=9/4x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
	KECAMATAN PELAIHARI														
			11.607.720.392		2.064.269.559		4.099.228.253						6.163.497.812		53,10%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		10.257.573.434		1.840.632.159		3.575.612.653		-		-		5.416.244.812		52,80%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen	11 Dokumen	3	860.000	-	1.100.000		-		-	-	1.960.000	0,00%	49,18%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7 Dokumen	1	860.000	-	-					1	860.000	14%	43,32%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	-	-	4	1.100.000					4	1.100.000	100%	55,00%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan	12 Bulan	3	1.699.823.578	-	3.361.520.823		0		0	-	5.061.344.401	0,00%	52,48%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	68 Orang	68	1.699.823.578	68	3.361.520.823					68	5.061.344.401	100%	52,48%
	Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen	-	-	-	-					-	-	0%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Kegiatan	3	69.008.099	-	141.316.600		-		-	-	210.324.699	0,00%	66,63%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	-	-	1	2.480.500					1	2.480.500	100%	34,16%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket	4	20.699.500	1	59.275.000					5	79.974.500	63%	64,19%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket	7	722.300		1.713.000					7	2.435.300	35%	36,73%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2	745.000	2	3.218.000					2	3.963.000	100%	34,61%
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	-	-	1	750.000					1	750.000	100%	100,00%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	70 Laporan	19	46.841.299	13	73.880.100					32	120.721.399	46%	73,16%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2 Jenis	3	56.912.982	-	56.438.180		-		-	-	113.351.162	0,00%	52,61%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	3	8.124.843	3	7.485.881					6	15.610.724	#VALUE!	43,30%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	3	48.788.139	3	48.952.299					6	97.740.438	#VALUE!	54,48%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	3	14.027.500	-	15.237.050		-		-	-	29.264.550	0,00%	37,86%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV		9		10=9/4x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pemerintahan Daerah														
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	30.000.000,00	1	5.500.700		5.826.500				1	11.327.200	100%	37,76%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit	40.500.000,00	3	7.626.800	3	8.260.550				3	15.887.350	50%	39,23%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 Unit	6.800.000,00	2	900.000	5	1.150.000				5	2.050.000	29%	30,15%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			38.489.280		1.137.400		13.174.510		-		-	14.311.910		37,18%
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa yang diberdayakan	15 Desa	38.489.280	-	1.137.400	-	13.174.510	-	-	-	-	14.311.910	0,00%	37,18%
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	30 laporan	38.489.280	1	1.137.400	5	13.174.510				6	14.311.910	20%	37,18%
	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			7.965.540		-		0		-		-	0		0,00%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Koordinasi	2 Kali	7.965.540	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0,00%	0,00%
		Jumlah Penanganan Gangguan dan Ketertiban Masyarakat di Kecamatan yang di fasilitasi	8 Kali												
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1 Laporan	7.965.540	-	-	-	-				-	-	0%	0,00%
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM			1.276.486.418		205.865.000		505.866.090		-		-	711.731.090		55,76%
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah Penyelenggara Urusan Pemerintahan Umum	2 Kegiatan	1.276.486.418	-	205.865.000	-	505.866.090	-	-	-	-	711.731.090	0,00%	55,76%
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	500 Orang	1.214.073.308	-	202.940.000	400	490.176.560				200	693.116.560	40%	57,09%
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	8 Dokumen	62.413.110	1	2.925.000	3	15.689.530	-	-	-	4	18.614.530	50%	29,82%
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			27.205.720		16.635.000		4.575.000		-		-	21.210.000		77,96%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3	Kali	27.205.720	-	16.635.000	-	4.575.000	-	-	-	-	21.210.000	0,00%	77,96%
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	15	Dokumen	4.812.440,00	-	-	15	4.575.000	-	-	-	15	4.575.000	100%	95,07%
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	Dokumen	2.393.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0,00%
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	2	Dokumen	19.999.680,00	2	16.635.000	-	-	-	-	-	2	16.635.000	100%	83,18%
	KELURAHAN PELAIHARI				1.362.551.179								467.977.320		34,35	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				374.255.986		74.178.360		117.533.960		-		-	191.712.320		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2.745.829				495.390				495.390			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	Dok	2.745.829			1	495.390				1	495.390	50%	18,04%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.097.619				2.645.000				2.645.000			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5	Dok	6.097.619			2	2.645.000				2	2.645.000	50%	43,37%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				67.293.413		-		16.372.587				16.372.587			
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	Paket	4.911.266									-	0	0
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	4	Paket	27.580.857			2	3.100.044				2	3.100.044	50%	11,24%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1	Paket	5.504.190				1.937.000					1.937.000	30%	35,19%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	3	Paket	4.797.100									-		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5	Lap	24.500.000			2	11.335.543				2	11.335.543	50%	46,27%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				111.064.544		35.399.100		57.944.000				93.343.100			
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang disediakan	5	Paket	47.154.185			5	41.160.000				5	41.160.000	100%	87,29%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang	4	Unit	63.910.359	2	35.399.100	2	16.784.000				4	52.183.100	100%	81,65%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV		9		10=9/4x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1		Disediakan													
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			158.232.331		32.179.260		32.076.983					64.256.243		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	43.740.000	3	3.525.360	3	3.474.384				7	6.999.744	500%	18,74%
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan	2.372.026									-	30%	20%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	112.120.305	3	28.653.900	3	28.602.599					57.256.499	50%	50%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			28.822.250		6.600.000		8.000.000					14.600.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	21.172.250		4.750.000	4	7.550.000					12.300.000	70%	58,09%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit	7.650.000		1.850.000	5	450.000					2.300.000	40%	30,06%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			988.295.193		108.915.000		167.350.000					276.265.000		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			988.295.193		108.915.000		167.350.000					276.265.000		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 Lembaga	17.403.860											
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Unit	374.116.043				450.000					450.000	20%	10%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas	314.893.935		42.315.000	1	97.600.000				1	139.915.000	50%	49,30%
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1 Dokumen	281.881.355		66.600.000		69.300.000					135.900.000	40%	50%
	KELURAHAN ANGSAU			1.314.361.341		234.569.986		545.753.657					780.323.643		5937%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			305.363.740		89.639.986		57.841.907					147.481.893		48,30%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			6.650.288	-	-		1.074.000					1.074.000		16,15%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dok	6.650.288	-	-	1	1.074.000					1.074.000	50%	16,15%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			1.999.800	-	-	-	-					-		-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	4 Dok	1.999.800	-	-	-	-					-		-
	Administrasi Kepegawaian			-	-	-	-	-					-		-

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%) 10=9/4x100%	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
	Perangkat Daerah		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	6.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			45.210.653		9.162.300		18.191.093						27.353.393		60,50%
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	15.375.182		5.178.500		7.738.180						12.916.680		84,01%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	4.904.491		3.983.800	-	-						3.983.800		81,23%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	430.980	-	-		330.000						330.000		76,57%
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Lap	24.500.000	-	-	1	10.122.913						10.122.913		41,32%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			66.794.164		45.887.900	-	-						45.887.900		68,70%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit	66.794.164		45.887.900	-	-						45.887.900	100%	68,70%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			144.620.835		30.792.236		30.754.864						61.547.100		42,56%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	32.500.530	3	2.138.336	3	2.100.964	1					4.239.300	50%	13,04%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	112.120.305	3	28.653.900	3	28.653.900	1					57.307.800	50%	51%
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			34.088.000		3.797.550		7.821.950						11.619.500		34,09%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	4 Unit	30.538.000		3.797.550		5.541.950						9.339.500		30,58%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	13 Unit	3.550.000	-	-		2.280.000						2.280.000		64,23%
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			1.008.997.601		144.930.000		487.911.750						632.841.750		62,72%
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			1.008.997.601		144.930.000		487.911.750						632.841.750		62,72%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	6.852.833	-	-	-	-						-	-	-
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	2 Paket	382.708.000	0	-	2	338.797.000						338.797.000	100%	89%
	Pemberdayaan Masyarakat di	Jumlah Pokmas dan Ormas	2 Pokmas		1		1							159.044.750	100%	56,85%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)	Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)			
				I		II		III		IV			9		10=9/4x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp		K	Rp	K	Rp
1	Kelurahan	yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	279.743.128	90.930.000	68.114.750											
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	10 Lap	339.693.640	3	54.000.000	3	81.000.000					135.000.000	50%	40%	
	KELURAHAN PABAHAN		1.011.413.023	187.916.003	151.795.789							339.711.792		3359%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		201.949.196	56.891.403	45.367.809							102.259.212		50,64%		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.362.191	260.000	337.600							597.600	50%	25,30%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	2.362.191	1 dokumen	260.000	2 dokumen	337.600				3 dokumen	597.600	50%	25,30%	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		66.640.012	20.294.749	14.557.059							34.851.808		52,30%		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 paket	944.225	1 paket	936.500	1 paket	-				1 paket	936.500	100%	99,18 %	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	16.502.255	1 paket	11.750.379	1 paket	819.532				1 paket	12.569.911	80%	76,17%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	3.710.306	1 paket	2.820.150	1 paket	546.200				1 paket	3.366.350	95%	90,73%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	8.800.726	1 paket	2.637.720	1 paket	150.000				1 paket	2.787.720	43%	31,68%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 laporan	36.682.500	4 laporan	2.150.000	6 laporan	13.041.327				10 laporan	15.191.327	50%	41,41%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		105.046.993	26.245.854	24.484.452							50.730.306		48,29%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 laporan	15.350.749	9 laporan	3.363.774	9 laporan	1.643.412				18 laporan	5.007.186	50%	32,62%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 laporan	89.696.244	3 laporan	22.882.080	3 laporan	22.841.040				6 laporan	45.723.120	50%	50,98%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		27.900.000	10.090.800	5.988.698							16.079.498		57,63%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	4 unit	19.000.000	4 unit	7.140.800	4 unit	3.703.698				4 unit	10.844.498	50%	57,08%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	17 unit	8.900.000	17 unit	2.950.000	17 unit	2.285.000				17 unit	5.235.000	67%	58,82%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		809.463.827	131.024.600	106.427.980							237.452.580		29,33%		

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
				809.463.827		131.024.600		106.427.980						237.452.580		29,33%
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	10 lembaga	6.360.062	10 lembaga	-	0	-					10 lembaga	-	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang terbangun	5 unit	402.596.000	2 unit	52.620.000	0	-					2 unit	52.620.000	40%	13,07%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	10 pokmas/ormas	257.334.160	10 pokmas/ormas	45.271.600	10 pokmas/ormas	75.428.980					10 pokmas/ormas	120.700.580	25%	46,90%
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah pokmas dan ormas yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di kelurahan	1 laporan	143.173.605	1 laporan	33.133.000	1 laporan	30.999.000					1 laporan	64.132.000	51,92%	44,79%
	KELURAHAN SARANG HALANG			1.061.265.458		95.138.694		35.603.019						129.741.713		12,23%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA			217.355.617		89.056.364		32.681.349						120.737.713		48,30%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			3.384.390	-	1.475.000		-						1.475.000		16,15%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dok	3.384.390	-	1.475.000	1							1.475.000	50%	16,15%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			775.000	-	-	-	-						-		-
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7 Dok	775.000	-	-	-	-						-		-
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			-	-	-	-	-						-		-
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang	-	-	-	-	-						-		-
	Administrasi Umum Perangkat Daerah			48.430.755		18.727.230		1.840.000						19.567.230		60,50%
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	1 paket	2.760.583	1	2.327.500										
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	1 Paket	22.067.403		11.833.000		-						11.833.000		84,01%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	1 Paket	12.648.703		4.214.230		-						4.214.230		81,23%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	1 Paket	7.954.066	1	1.000.000		1.000.000						1.000.000		76,57%
	Penyediaan Bahan Bacaan dan	Jumlah paket Penyediaan	2 paket		1		1							2.520.000		41,32%

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi	Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
				I		II		III		IV		9		10=9/4x100%	
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp
1	Perundang-Undangan	Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan	3.000.000	1.680.000	840.000										
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		3.624.228	3.500.000	-							3.500.000	68,70%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 unit	3.500.000	-	-						3.500.000	100%	68,70%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		107.996.244	51.902.649	25.868.549							77.771.198	42,56%		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	18.300.000	6.082.330	3	2.921.670	1				9.004.000	50%	13,04%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	89.696.244	45.820.319	3	22.946.879	1				68.767.198	50%	51%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		53.145.000	13.451.485	4.972.800							18.424.285	34,09%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yg dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	5 unit	46.145.000	11.290.485	5	4.972.800					16.263.285	30,58%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	18 Unit	7.000.000	2.161.000	-	-					2.161.000	64,23%		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		843.909.841	29.400.000	219.973.290							249.373.290	62,72%		
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		843.909.841	29.400.000	219.973.290							249.373.290	62,72%		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	1 Kegiatan	16.499.850	-	-	-					-	-		
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	1 Paket	289.931.818	0	0	-					-	100%	89%	
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	7 Pokmas	163.136.520	0	1	57.290.000					57.290.000	100%	56,85%	
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	12 laporan	374.341.653	29.400.000	3	162.683.290					192.083.290	50%	40%	
	KELURAHAN KARANG TARUNA		1.167.960.963	154.855.148	216.155.840							373.997.588	32,02%		
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		308.575.378,00	79.602.523,00	78.186.200,00							160.775.323,00	0,00%	52,10%	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2.379.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4	2.379.063,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Pelaporan Keuangan (Bulan)	12	1.675.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Pelaksanaan Penatausahaan	Jumlah Dokumen	2		-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
					K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp				
1	2	3	4		5		6		7		8		9		10=9/4x100%	
	dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)		1.675.000,00												
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Terpenuhiya Administrasi Umum Perangkat Daerah (Kegiatan)	5	176.199.137,00	4	49.620.500,00	46.239.050,00	-	-	-	-	4	98.846.150,00	0,00%	56,10%	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	584.475,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Paket)	16	103.340.428,00	4	45.523.000,00	9	28.276.750,00				13	73.799.750,00	81,25%	71,41%	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2	6.399.179,00	1	1.510.000,00	-	-	-	-	-	1	1.510.000,00	50,00%	23,60%	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2.375.055,00	-	-	1	1.115.000,00	-	-	-	1	1.115.000,00	50,00%	46,95%	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (laporan)	15	63.500.000,00	3	2.587.500,00	3	16.847.300,00	-	-	-	6	22.421.400,00	40,00%	35,31%	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	108.672.183,00	6	27.532.023,00	6	26.777.150,00	-	-	-	12,00	54.309.173,00	600,00%	49,98%	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (laporan)	12	21.600.000,00	3	5.405.073,00	3	4.650.200,00				6	10.055.273,00	50,00%	46,55%	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	87.072.183,00	3	22.126.950,00	3	22.126.950,00				6	44.253.900,00	50,00%	50,82%	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2	19.649.995,00	-	2.450.000,00	-	5.170.000,00	-	-	-	-	7.620.000,00	0,00%	38,78%	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (unit)	5	14.499.995,00	2	2.450.000,00	1	3.920.000,00				3	6.370.000,00	60,00%	43,93%	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (unit)	11	5.150.000,00	-	-	3	1.250.000,00				3	1.250.000,00	27,27%	24,27%	
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN			859.385.585,00		75.252.625,00		137.969.640,00					213.222.265,00	-	24,81%	
	Kegiatan Pemberdayaan						137.969.640						213.222.265		24,81%	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target kinerja dan anggaran berjalan tahun 2023 (n-1) yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Sampai Dengan Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD yang dievaluasi (2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Tahun 2023 (%)	
					I		II		III		IV					
					4		5		6		7					
K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			
	Kelurahan		859.385.585		75.252.625											
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan (Lembaga)	5	8.128.054,00	-	-	-	-					-	-	0	0,00%
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun (Unit)	1	237.459.272,00	-	-	-	-					-	-	0	0,00%
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Pokmas)	2	307.405.327,00	3	30.252.625,00	3	104.369.640,00						134.622.265,00	0	43,79%
	Evaluasi Kelurahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan (Laporan)	12	306.392.932,00	3	45.000.000,00	3	33.600.000,00						78.600.000,00	0	25,65%

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Struktur organisasi Kecamatan Pelaihari disusun berdasarkan peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan yang dijabarkan ke Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan.

Kecamatan Pelaihari menyelenggarakan tugas pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, pemberdayaan masyarakat dan desa, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan pelimpahan kewenangan oleh Bupati Tanah Laut, sesuai karakteristik wilayah, kebutuhan daerah dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Kapasitas pelayanan yang dijalankan oleh Kecamatan Pelaihari adalah melaksanakan koordinasi, penyelenggaraan pemerintah umum, pembangunan, perekonomian, produksi, pertanian, kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial dan budaya di wilayah kerjanya yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kapasitas pelayanan ini dilakukan sebagai berikut :

1. Koordinasi/konsultasi dengan Instansi terkait, Kecamatan dan Desa/ Kelurahan.
2. Memberikan pelayanan Bidang Pemerintahan Umum, Desa dan Kelurahan.
3. Memberikan pelayanan bidang Kependudukan dan Kemasyarakatan.
4. Memberikan pelayanan bidang Pembangunan, Ekonomi dan Sosial Budaya.
5. Memberikan pelayanan dibidang Keamanan dan ketertiban, pertahanan Sipil dan perlindungan masyarakat.
6. Penyediaan data dan informasi sebagai bahan pembangunan bagi masyarakat.

Bentuk jenis layanan yang diberikan oleh Kecamatan Pelaihari yaitu :

- a. Pelayanan Non Perijinan
 1. Rekomendasi Perizinan
 2. Rekomendasi Nikah
 3. Pengantar Pindah Domisili
 4. Pengantar KTP

5. Pengantar Kartu Keluarga
6. Legalisasi Permohonan Perizinan
7. Legalisasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Legalisasi Surat Keterangan Ahli Waris
9. Legalisasi Surat Keterangan Ghaib
10. Legalisasi Proposal Bantuan
11. Legalisasi Surat Keterangan Berkelakuan Baik
12. Legalisasi Surat Izin Keramaian
13. Legalisasi Surat Kehilangan
14. Legalisasi Surat Keterangan Usaha
15. Legalisasi Permohonan Perizinan

b. Pelayanan Perijinan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil
2. Izin Bilyard Non Komersil
3. Izin Playstation/Video Game

Berdasarkan data hasil pengolahan survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Pelaihari pada semester I (Mei-Juni) tahun 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, maka dari 101 responden menyatakan puas terhadap pelayanan yang di berikan.

Survei dilakukan kepada responden/masyarakat yang datang secara langsung ke Kecamatan Pelaihari.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD.

Koordinasi dan sinergi program antar SKPD Kabupaten Tanah Laut selama ini sudah terakomodir dalam kegiatan Musrenbang Kecamatan dan Kabupaten serta forum SKPD. Sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di kecamatan sudah terkoordinasikan dengan baik. Sementara untuk program di Kecamatan Pelaihari sendiri sudah ada dalam Renstra Kecamatan Pelaihari yang selanjutnya dijabarkan dalam Renja SKPD.

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pelaihari yang juga menjadi isu strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Permasalahan Dalam Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pelaihari

Tugas Pokok dan Fungsi		Masalah
Tugas Pokok	Kecamatan Pelaihari mempunyai tugas dan fungsi Melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan rumah tangga daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan jumlah dan kemampuan SDM 2. Terbatasnya Sarana Prasarana 3. Terbatasnya anggaran pelaksanaan kegiatan 4. Pemberian pelayanan belum optimal
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> a. Penyelenggara perencanaan program pembangunan dan perekonomian produksi pertanian kesejahteraan sosial, lingkungan hidup, sosial budaya dilingkungan kecamatan. b. Penyelenggara tugas pemerintahan umum ketentraman dan ketertiban umum pembangunan pertanian sosial budaya lingkungan hidup dan pertanahan ; c. Pembinaan administrasi pemerintahan desa/ kelurahan ; d. Pembinaan bidang ketentraman dan ketertiban umum kesbanglinmas dan kerukunan antar umat beragama ; e. Pengkoordinasian kegiatan Unit Pelaksana Teknis Dinas(UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di wilayah kerja; f. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi-Instansi terkait di wilayahnya ; g. Pelaksanaan Tugas Pembantuan. h. Penyusunan pelaksanaan program, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan, dan i. Pelaksanaan tugas-tugas yang diberikan oleh Bupati dan Sekretaris Daerah. 	

Dalam mencapai visi dan misi Kecamatan Pelaihari tahun 2019-2023 terdapat tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Tantangan dan peluang yang di hadapi oleh Kecamatan Pelaihari adalah :

1. Tantangan
 - a. Adanya perubahan kebijakan/peraturan.
 - b. Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam memberikan penilaian kinerja pelayanan.
 - c. Terbatasnya jumlah SDM untuk mengisi/ditempatkan di Kecamatan.
2. Peluang
 - a. Adanya penerapan PATEN (Pelayanan Terpadu Kecamatan) berdasarkan Permendagri Nomor 4 Tahun 2010.
 - b. *Political Will* Pemerintah Kabupaten yang kuat untuk meningkatkan kualitas pelayanan.
 - c. Dukungan dai stakeholder terkait untuk peningkatan pelayanan.

Terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari dan juga sekaligus yang menjadi isu penting terhadap pencapaian tujuan dan sasaran visi dan misi Kecamatan Pelaihari tahun 2023, diharapkan agar Pemerintah Kabupaten Tanah Laut segera menindaklanjuti permasalahan yang dihadapi oleh Kecamatan Pelaihari yaitu :

1. Menambah staf yang produktif/berkualitas untuk ditempatkan di Kecamatan Pelaihari.
2. Mengadakan sosialisasi/pelatihan, koordinasi dan pembinaan secara lebih intensif.
3. Memberikan anggaran yang secara rasional dapat digunakan untuk melengkapi sarana prasarana dan untuk melaksanakan kegiatan.

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Program dan kegiatan Kecamatan Pelaihari jika dibandingkan dengan Rancangan awal RKPD Kecamatan Pelaihari Tahun 2022, maka Pagu Indikatif Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 sebesar Rp.11.607.720.392 (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah), sedangkan Pagu Indikatif Tahun 2022 sebesar Rp. 11.089.723.901 (Sebelas Milyar Delapan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Tiga ribu Sembilan Ratus Satu Rupiah), Jadi Pagu Indikatif Renja pada Tahun 2023 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 517.996.491,- (Lima Ratus Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah).

2.5. Penelaahan Usulan program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat di Kecamatan Pelaihari diusulkan melalui kegiatan Murenbang yang diselenggarakan di kecamatan. Sebelum Musrenbang Kecamatan dilaksanakan terlebih dahulu dilaksanakan Musrenbang desa yang hasilnya menjadi usulan masing-masing desa untuk dibawa dalam Musrenbang Kecamatan.

Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan usulan masing-masing desa dan Pemerintah Daerah sedianya dapat merealisasikannya melalui program dan kegiatan pada instansi penanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pelaihari yaitu memfasilitasi dan mengkoordinasikan usulan tersebut dengan instansi yang terkait.

BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Rencana Kerja merupakan penjabaran lebih lanjut dari sasaran, program, kegiatan dan Indikator Kinerja kegiatan. Indikator kinerja pada Kecamatan Pelaihari pada dasarnya sama dengan ruang lingkup kerja instansi lainnya dimana yang dimaksudkan adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan/dianggarkan.

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Kebijakan Provinsi

Dalam penyusunan Renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 telah mengacu pada kebijakan dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Serta disinkronkan dengan arah pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk menjaga sinergitas pelaksanaan pembangunan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Adapun kegiatan dalam renja Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 apabila disandingkan dengan kebijakan pusat dan provinsi diuraikan pada Tabel 3.1. sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Persandingan antara Prioritas Nasional, Provinsi,
Kabupaten dengan Usulan Rencana Kerja Tahun 2023

Kebijakan Pusat	Kebijakan Provinsi	Prioritas pembangunan Kab. Tanah Laut	Program dalam Renja 2023
Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola	Melaksanakan Pemerintahan yang baik	Reformasi birokrasi, Meningkatkan pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik	1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan 3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum 5. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Dalam rangka turut mendukung pelaksanaan Visi Misi Kabupaten Tanah Laut sesuai yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023, adalah Misi kesatu yaitu meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan pelayanan masyarakat yang berbasis teknologi, yang pada gilirannya nanti meningkatkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya di Daerah Kabupaten Tanah Laut, Misi Ketiga yaitu membangun tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), Misi Ke Empat yaitu Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan social lingkup kecamatan. Dalam hal ini Kecamatan Pelaihari merupakan SKPD yang mendukung dalam peningkatan sistem pelayanan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), Membangun tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), dengan indicator Nilai SAKIP, Nilai RB, serta Meningkatkan kuantitas dan kualitas religiusitas dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah dan kehidupan masyarakat, Indikator Cakupan kinerja program aksi keagamaan dan social lingkup kecamatan.

Tujuan Renja Kecamatan Pelaihari tahun 2023 adalah sebagai penjabaran dari Renstra Kecamatan Pelaihari, yaitu melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023. Tujuan jangka menengah Kecamatan Pelaihari adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan, Pemberdayaan Masyarakat Desa, Keamanan dan Ketertiban serta Pelayanan.
2. Meningkatkan tata kelola administrasi perkantoran Kecamatan Pelaihari yang akuntabel.

Sedangkan Uraian tugas Kecamatan Pelaihari sesuai Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 57 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Kecamatan sebagai berikut:

- a. Menetapkan perencanaan strategis kecamatan berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 4 Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah (RPJPD) Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dan program kerja tahun lalu sebagai pedoman kerja;

- b. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemerintahan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang ketentraman dan ketertiban umum di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pemberdayaan masyarakat dan desa di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan dalam bidang pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengoordinasikan membina dan mengawasi kegiatan dalam bidang kesejahteraan rakyat di wilayah kecamatan sesuai dengan kebijakan Daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan kegiatan pelayanan umum dan masyarakat di kecamatan sesuai dengan kebijakan daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan kepada kecamatan;
- i. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang penerapan dan menegakkan peraturan perundang-undangan daerah di wilayah kecamatan;
- j. Mengoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan pemeliharaan prasarana, sarana dan fasilitas pelayanan umum di wilayah kecamatan;
- k. Mengoordinasikan penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembinaan keagrariaan, dan pembinaan politik dalam negeri;
- l. Mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
- m. Membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan;

- n. Melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintahan Daerah yang ada di kecamatan;
- o. Mengendalikan pengelolaan urusan kesekretariatan;
- p. Mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas kecamatan;
- q. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggung jawaban dan bahan masukan;
- r. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan; dan
- s. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangannya.

3.2. Program dan Kegiatan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kecamatan Pelaihari, selain itu juga mendukung dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, Kecamatan Pelaihari sebagai salah satu SKPD yang lebih dominan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, maka Kecamatan Pelaihari akan terus meningkatkan pelayanan agar masyarakat dapat terlayani dengan baik.

Untuk mendukung dalam pencapaian visi dan misi tersebut, program-program kerja untuk 5 (lima) tahunan selanjutnya dijabarkan kedalam program-program kerja tahunan. Jumlah program kegiatan Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima) Kelurahan yakni sebagai berikut :

1. Kecamatan Pelaihari

Jumlah program kerja untuk Renja Perubahan APBD Kecamatan Pelaihari tahun 2023 terdiri dari 5 Program, 9 kegiatan serta 22 sub kegiatan. Adapun program kegiatan, sub kegiatan tersebut yaitu :

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran	
			Setelah Perubahan (Rp).	Bertambah/ Berkurang
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	10.376.407.53		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	6	10.480.159.142	103.751.606
	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan	0	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp).	Bertambah/ Berkurang
	Perangkat Daerah			
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	0	0	0
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	0	0	0
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9.969.932.257	9.969.932.257	0
1	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	9.969.932.257	9.969.932.257	0
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	0
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	0
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	97.874.220	161.925.726	64.251.506
1	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	7.545.473	9.545.473	2.000.000
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	30.151.763	34.659.896	4.708.133
3	Penyediaan peralatan peralatan rumah tangga	0	37.543.473	37.543.373
4	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	10.176.884	10.176.884	0
5	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	50.000.000	70.000.000	20.000.000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	0	19.300.000	19.300.000
1	Pengadaan mebel	0	19.300.000	19.300.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	236.801.059	236.801.059	0
1	Penyediaan jasa surat menyurat	0	0	0
2	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	41.757.859	41.757.859	0
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	0	0	0
4	Penyediaan jasa pelayanan umum kanor	195.043.200	195.043.200	0
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	60.000.000	134.000.000	15.200.000
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan pajak dan perizinan	60.000.000	74.000.000	14.000.000

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp).	Bertambah/ Berkurang
	kendaraan dinas operasional atau lapangan			
2	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	11.800.000	13.000.000	1.200.000
2	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	0	0	0
	Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	0	0	0
1	Fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayah kecamatan	0	0	0
3	Program Pembinaan Masyarakat Desa dan Kelurahan			
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	0	0	0
1	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	0	0	0
2	Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	0	0	0
3	Peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	0	0	0
4	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	0	0	0
1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	0	0
5	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	703.402.821	703.402.821	0
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	703.402.821	703.402.821	0
1	Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar	0	0	0

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Setelah Perubahan (Rp).	Bertambah/ Berkurang
	Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta pemertahanan dan pemeliharaan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			
2	Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	703.402.821	703.402.821	0
6	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.913.544	9.913.544	0
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	9.913.544	9.913.544	0
1	Fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	0	0	0
2	Fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa	9.913.544	9.913.544	0
		11.089.723.90	11.193.475.507	103.751.606
		1		

Dari pelaksanaan 6 (enam) program tersebut di atas kebutuhan dana indikatif Renja Perubahan adalah sebesar Rp. 11.607.720.392,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah).

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 dapat dilihat pada Lampiran.

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	IKM	76.61
1.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Kinerja dan perencanaan keuangan yang disusun sesuai ketentuan yang berlaku	9 Dokumen

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen	3 Dokumen
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah dokumen	1 Dokumen
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen	4 Dokumen
1.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun sesuai ketentuan	17 Dokumen
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pembayaran Gaji dan TPP ASN Kecamatan Pelaihari dan 5 (lima) Kelurahan	14 bulan
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Dokumen	1 Dokumen
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah penyusunan Dokumen	16 Dokumen
1.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	5 Jenis
1.4.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	5 Jenis
1.4.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	44 Jenis
1.4.3	Penyediaan Barang Logistik Kantor	Jumlah penyediaan BBM Kendaraan Dinas	12 Bulan
1.4.4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	7 Jenis
1.4.5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah penyediaan makanan dan minuman	1560 orang
		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	12 bulan
1.5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran	4 Jenis
1.5.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah tenaga PTT yang di bayar	3 orang
1.5.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air, listrik dan Internet	4 item

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA
1.5.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pembelian peralatan dan perlengkapan kantor	11 Jenis
1.5.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah belanja jasa jaminan barang milik daerah	12 bulan
		Jumlah pembelian alat pembersih dan bahan pembersih	22 bulan
		Jumlah pembuatan panggung dan backdrop kantor	1 Paket
1.6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah sarana dan prasarana yang terpelihara dengan baik	29 unit
1.6.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional/Lapangan	Jumlah pembayaran jasa service, penggantian suku cadang, pelumas kendaraan dinas roda 2 dan roda 4 Kecamatan Pelaihari	6 Unit
		Jumlah pembayaran pajak kendaraan dinas/operasional roda 2 dan roda 4 Kecamatan Pelaihari	6 Unit
1.6.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pemeliharaan peralatan kerja	17 unit
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	IKM	76,61
2.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan masyarakat pelayanan terpadu kecamatan sesuai SOP	18 jenis
2.1.1.	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah dokumen IKM	1 Dokumen
3	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	IKM	76,61
3.1.	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah desa yang diberdayakan	15 Desa
3.1.1.	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah musyawarah perencanaan pembangunan di Desa	4 Kali

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA
3.1.2	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang di lakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	Jumlah kegiatan pameran	2 Kali
3.1.3	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah kegiatan	3 Kegiatan
4	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	IKM	76,61
4.1.	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah penanganan gangguan dan ketertiban masyarakat di Kecamatan yang di fasilitasi	8 Kali
4.1.1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah koordinasi	8 Kali
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	IKM	76,61
5.1.	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah pembinaan terhadap ASN, Masyarakat serta Aparat terkait	5 Kali
5.1.1.	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika, serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Republik Indonesia	Jumlah terlaksananya penyuluhan pembinaan kebangsaan dan ketahanan nasional	1 Kali
5.1.2.	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah buka bersama/safari ramadhan Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Pemkab dengan masyarakat	1 Kali
		Jumlah organisasi penerima hibah	15 Kelompok
		Jumlah STQ Tingkat Kecamatan Pelaihari	1 Kali

NO	PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET CAPAIAN KINERJA
		Jumlah terkirimnya Kafilah/Official dalam kegiatan STQ/MTQ Tingkat Kabupaten Tanah Laut	90 Orang
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	IKM	76,61
6.1.	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang mengelola administrasi pemerintahan dengan baik	15 Desa
6.1.1	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah peserta sosialisasi	40 orang
6.1.2	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah musrenbang kecamatan	2 kali

BAB IV

PENUTUP

Total kebutuhan dana indikatif Renja Kecamatan Pelaihari yaitu sebesar adalah Rp. 11.607.720.392,- (Sebelas Milyar Enam Ratus Tujuh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah). Dari pelaksanaan 6 (enam) program tersebut di atas kebutuhan dana indikatif Renja Perubahan adalah sebesar Rp. Rp. 11.881.464.178,- (Sebelas Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Empat Ribu Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah), dengan jumlah perubahan sebesar Rp. 273.743.786,- (Dua Ratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Enam Rupiah) yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023. Dana tersebut digunakan untuk Program dan Kegiatan yang direncanakan berjumlah 5 Program, 9 kegiatan serta 22 sub kegiatan.

RENJA Perubahan Kecamatan Pelaihari Tahun 2023 merupakan rencana pembangunan tahunan, sebagai bahan dalam penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) Perubahan Tahun Anggaran 2023. Dengan program dan kegiatan yang sudah direncanakan di Kecamatan Pelaihari, tentunya juga akan mendukung program kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Laut di Tahun 2023. Oleh karena itu, kami berharap nantinya Pemerintah Kabupaten Tanah Laut dalam hal ini Tim verifikasi RENJA juga akan mendukung program dan kegiatan yang sudah direncanakan agar permasalahan yang hadapi oleh kecamatan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi bisa ditindaklanjuti.

Pelaihari, Sepetember 2023

Camat Pelaihari,



AGUS SETIYO, S.SIP, M.M
Pembina
NIP. 19850808 200412 1 001